



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KESEHATAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a.

bahwaberdasarkanSuratPersetujuanKepalaArsipNasionalRe publik Indonesia Nomor B-PK.02.09/77/2019 Tanggal 24 Mei 2019

perihalPersetujuanJadwalRetensiArsipFasilitatifFungsiKeuangan danKepegawaianAparaturSipil NegaradanPejabat NegarasertaSubstantifPemerintah Daerah KabupatenBrebes, makaperlumenetapkanJadwalRetensiArsipSubstantifUrusanKese hatanPemerintahDaerah KabupatenBrebes;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerahKabupatendalamPropinsiJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);



3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
11. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penilaian Arsip bagi Instansi Pemerintah, Badan Usaha dan Swasta;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun

2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas fungsi dan uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Arsip adalah Rekam kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Retensi Arsip adalah Jangka Waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
5. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisikan kurang - kurangnya berisikan jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisikan rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.



6. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi jenis atau seri arsip yang diciptakan karena pelaksanaan fungsi pokok (substantif) Pemerintahan Daerah yang berada pada unit Organisasi di lingkungan Dinas - dinas atau Unit Organisasi.
7. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten.
8. Pemindahan Arsip Inaktif adalah kegiatan pengurangan arsip inaktif dan pengalihan tanggung jawab pengolahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan di Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
9. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip yang tidak bernilai guna dan pengamanan informasi yang dilakukan dengan cara penghancuran fisik arsip sampai tidak dapat dikenali lagi.
10. Penyerahan Arsip Statis adalah kegiatan pengurangan arsip pengalihan tanggung jawab pengelolaan arsip statis dari lembaga pencipta arsip kepada lembaga kearsipan dan amrangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif dan bahan pertanggungjawaban.
11. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
12. Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah pencipta arsip.
13. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah lain atau kepentingan umum diluar Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban Nasional.
14. Jenis Arsip adalah kelompok dokumen yang diatur dalam suatu sistem pemberkasan tertentu atau dipertahankan sebagai satu unit karena mereka terciptakan dari kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan kesamaan aktifitas, memiliki bentuk khusus, atau karena beberapa keterkaitan lain yang muncul dari penerimaan, penciptaan atau penggunaannya.

15. JangkaWaktuSimpan /Retensiadalah masa simpan minimal suatujenisarsippada unit pengolahdanatau unit kearsipan.
16. JangkaWaktuSimpan / RetensiAktifadalah masa simpan minimal suatujenisarsippada unit pengolah.Jangkawaktusimpanarsipaktifsejakberakhirnya masa satutahunanggaranatausetelah proses kegiatandinyatakansesaidilaksanakan.
17. JangkaWaktuSimpan / RetensiInaktifadalah masa simpan minimal suatujenisarsippada unit kearsipan / pusatarsip.Jangkawaktusimpanarsipinaktifdihitungsejakhabisnya masa retensiarsipaktifsampainilaigunanyauntukkepentinganreferensiberakhir.
18. MusnahpadakolomKeteranganadalahketerangan yang menyatakanbahwasuatujenisarsipdapatdimusnahkankarenajangkawaktupenyimpanannyatelahhabisdantidakmemiliniilaigunalagi.
19. PermanenpadakolomKeteranganadalahketerangan yang menyatakanbahwasuatujenisarsip yang memiliniilaigunasekunderataunilaiguna primer, wajibdiserahkankepadaLembagaKearsipan Daerah Kabupatensebagai buktipertanggungjawabansesuidenganlingkuptugasdanfungsimasing - masing.
20. DinilaiKembaliadalahketerangan yang menyatakanbahwasuatujenisarsipbelumdapatditentukannasibakhirnyaapakah musnahataupermanen,perludilakukanpenilaiankembalidanpengkajiankembali.

BAB II

JRA

Pasal 2

- (1) JRASubstantifUrusanKesehatanditetapkanBupatiBrebesBersamaPerangkat Daerah terkait / DinasKesehatanKabupatenBrebes.
- (2) KetentuanmengenaiJRASubstantifUrusanKesehatantercantumdalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturanBupatiini.

Pasal 3

- (1) JRASubstantifUrusanKesehatanberpedomanpadaPedomanRetensiArsipNasiona lRepublik IndonesiaNomor 17 Tahun 2015 tentang PedomanRetensiArsipUrusanKesehatan.



- (2) JRA Substantif Kesehatan memuat jenis arsip / dokumen, retensi aktif, retensi inaktif dan keterangan.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.

Pasal 4

Retensi Arsip Aktif dan Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini memperhatikan ketentuan untuk kepentingan unit pengolahan dan unit kearsipan dalam pertanggungjawaban Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penentuan retensi arsip aktif dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai.
- (2) Penentuan retensi arsip inaktif dihitung setelah habis masa retensi aktif.
- (3) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak selesainya kegiatan / atau setiap tahun anggaran berakhir.

Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. Keterangan Musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip inaktif tersebut tidak memiliki nilai guna;
- b. Keterangan Permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan; dan
- c. Keterangan Dinilai Kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan Keuangan.

Pasal 7

JRA Substantif Urusan Kesehatan yang sedang dalam proses persetujuan harus sudah disesuaikan dengan Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8



Segalabiaya yang
timbulakibatditetapkannyaPeraturanBupatiinidibebankanpadaAnggaranPendapatan
danBelanja Daerah KabupatenBrebes.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal9

DenganberlakunyaPeraturanBupatiini,makaKeputusanBupatiBrebesNomor
045/00339Tahun1994tentangJadwalRetensiArsipPemerintahKabupatenBrebesdica
but dan dinyatakantidakberlaku.

Pasal 10

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang
mengetahuinyamemerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempata
nnyadalamBerita Daerah KabupatenBrebes.

Ditetapkan di Brebes
padatanggal 12 Agustus 2019

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di
terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KABUPATEN BREBES

ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN,M.T.

Pembina Utama Muda

NIP.19650903 198903 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2019 NOMOR 44



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara